

HARIAN

# LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**

EDISI SENIN / 03 Agustus 2020

HARIAN UNTUK UMUM  
TERBIT SENIN - JUMAT  
12 Halaman

E-mail redaksi@lenteratoday.com  
Redaksi 031-87854491  
Iklan 031-87854491  
Kantor Redaksi  
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26  
Surabaya

Jika Anda adalah seorang yang fokus pada pesaing, Anda harus menunggu sampai waktu di mana pesaing Anda melakukan sesuatu. Tapi jadi orang yang fokus pada konsumen, maka Anda akan menjadi pionir

Jeff Bezos, CEO Amazon

## NTAPS! MA ATUR BUI

# SEUMUR HIDUP BAGI KORUPTOR



Di tengah pandemi Covid-19 yang seperti tak berujung, angin segar terus berembus dalam aksi pemberantasan korupsi di Indonesia. Pasca berhasil meringkus buronan selama 11 tahun kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Malaysia-- saat ini telah berada di tahanan Mabes Polri, Jakarta-- Mahkamah Agung (MA) juga mengeluarkan gebrakan. Dalam peraturan MA (Perma) barunya, koruptor Rp 100 miliar bakal dipenjara seumur hidup. Aturan itu dimuat dalam Perma Nomor 1 tahun 2020 dengan tujuan menghindari disparitas (perbedaan) hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lain. Ntaps (Mantap)!

Baca Hal 11

### 5 Kategori Peraturan MA terkait Koruptor

- Kategori paling berat yaitu kerugian negara lebih dari Rp 100 miliar.
- Kategori berat yaitu kerugian negara Rp 25 miliar-Rp 100 miliar.
- Kategori sedang yaitu kerugian negara Rp 1 miliar-Rp 25 miliar.
- Kategori ringan yaitu kerugian negara Rp 200 juta-Rp 1 miliar.
- Kategori paling ringan yaitu

kurang dari Rp 200 juta.  
**Pertimbangan kesalahan, dampak, dan keuntungan bagi si koruptor :**

- Kesalahan Tinggi, Dampak Tinggi dan Keuntungan Terdakwa Tinggi
- Kesalahan sedang, Dampak Sedang dan Keuntungan terdakwa sedang
- Kesalahan rendah, Dampak rendah dan Keuntungan Terdakwa rendah

### RENTANG HUKUMAN BAGI KORUPTOR DI BAWAH RP 200 JUTA

- Pidana penjara 3-4 tahun: korupsi Rp 150 juta-Rp 200 juta.
- Pidana penjara 2-3 tahun: korupsi Rp 100 juta-Rp 150 juta.
- Pidana penjara 1-2 tahun: korupsi Rp 50 juta-100 juta.

### UPDATE PERKEMBANGAN VIRUS CORONA

	KASUS POSITIF	SEMBUH	MENINGGAL DUNIA
INDONESIA	111,455	68,975	5,236
Seluruh Dunia	17,859,763	10,564,263	685,179

Update : 02 Agustus 2020 Pukul 15.09 PM  
Sumber : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Johns Hopkins

### SIMULASI HUKUMAN BERDASARKAN PERMA 1/2020

- Penjara Seumur Hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi.  
Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan sedang dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang.  
Penjara 10 tahun-13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 100 miliar lebih, kesalahan ringan, dampak ringan dan keuntungan terdakwa ringan.
- Penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar; kesalahan tinggi, dampak tinggi dan keuntungan terdakwa tinggi.
- Penjara 10 tahun-13 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar; kesalahan sedang dampak sedang dan keuntungan terdakwa sedang.
- Penjara 8-10 tahun penjara: terdakwa korupsi Rp 25 miliar-Rp 100 miliar; kesalahan ringan,

### Hal-Hal Yang Memberatkan

- Pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (residivis)
- Tidak kooperatif dalam menjalani proses peradilan
- Mencoba menghilangkan alat bukti
- Telah menggunakan hasil pidana
- Merupakan aparat penegak hukum

### Hal-Hal Yang Meringankan

- Belum pernah dipidana
- Kooperatif dalam menjalani proses peradilan
- Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidananya
- Memberikan keterangan secara terang dalam persidangan
- Menyerahkan diri dalam proses pidana yang dilakukan
- Belum menikmati hasil kejahatannya
- Lanjut usia/sakit
- Mengembalikan harta hasil kejahatan sebelum pembacaan putusan
- Memiliki keadaan ekonomi yang buruk

## SURABAYA GELAR SIMULASI PEMBUKAAN SEKOLAH DI 21 SMP

Surabaya- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam waktu dekat berencana membuka kembali proses pembelajaran, diawali dari tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rencananya terdapat 21 SMP di Kota Pahlawan akan menjadi pilot project.

Untuk diketahui, Dalam peraturan bersama empat menteri, yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), menteri agama (Menag), menteri kesehatan (Menkes), serta menteri dalam negeri (Mendagri), pembukaan sekolah itu setidaknya mempertimbangkan empat hal. Yakni, lokasi berada di zona hijau, ada izin dari pemerintah daerah, ada disiplin pemenuhan protokol kesehatan di sekolah, dan izin dari orangtua.

Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajataro mengatakan, jumlah tersebut masih direncanakan mewakili lima wilayah di Kota Surabaya, dari berbagai macam kategori sekolah. "Bagaimana pengajaran di kelas, bagaimana di toilet semua akan diajukan dalam simulasi dan evaluasinya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, apakah memungkinkan atau tidak. Belum final, pelaksanaan mulai hari Senin. Jadi dilihat perkembangan simulasinya seperti apa," kata Febri, Minggu (2/8).

Namun, tambah Febri, para guru harus dilakukan rapid test terlebih dulu. Dan rapid test akan digelar Senin (2/8) hari ini. "Hari Senin pun rencana para guru yang bertugas akan dilakukan rapid test," ujarnya.

Dan tim yang akan melakukan simulasi yakni Dinas Pendidikan, Linmas, Satpol dan



Kabag Humas Pemkot Surabaya Febriadhitya Prajataro

satgas. Dengan harapan ketika berjalan bisa baik pelaksanaannya. Untuk melihat sekolah sudah siap, akan dibuatkan laporan terlebih dulu. "Seperti apa kondisinya, mana-mana sekolah yang benar-benar siap untuk pelaksanaan belajar mengajar SMP," ujarnya.

Febri belum bisa memastikan simulasi itu bakal berlangsung hingga kapan. Namun dia mengatakan, proses simulasi itu juga bakal dibarengi dengan evaluasi hingga benar-benar dinyatakan siap, proses semacam itu bakal terus dilakukan. "Tergantung kondisi di lapangan seperti apa, kan harus melihat lokasi," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Supomo mengungkapkan, orang tua tentu akan dilibatkan dalam pembukaan 21 sekolah tersebut. Mereka akan disodori surat pernyataan untuk memberikan izin atau tidak anaknya masuk sekolah. "Walaupun tidak di atas meterai, sudah cukup memberikan gambaran kalau orang tua setuju atau tidak," kata Supomo.

Dia menegaskan, tidak akan ada paksaan

bagi orang tua. Sebab, sistem belajar secara daring juga tetap akan diterapkan di 21 sekolah tersebut. "Yang sudah ikut dalam perjalanan boleh tidak ikut. Sebaliknya, yang kemarin tidak ikut dalam perjalanan boleh ikut. Tidak ada paksaan, tergantung orang tua," jelas Supomo.

Namun, orang tua yang tak mengizinkan anaknya untuk masuk sekolah juga harus mempertimbangkan kondisi pembelajaran siswa. Apakah orang tua tersebut punya kemampuan untuk memberikan pendampingan kepada anaknya dalam belajar daring? "Ketika keputusan sekolah di rumah saja, ya harus punya kemampuan untuk mengendalikan anak," jelas dia.

Salah satu yang bisa terjadi, orang tua bekerja dan anak belajar sendiri di rumah tanpa pendampingan. Karena itu, pengawasan anak lebih minim di rumah pada jam-jam belajar di sekolah.

Sementara itu, menanggapi dibukanya SMP di Surabaya, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah mengatakan untuk meminta kajian mendalam. "Terkait hal tersebut, penerapan protokol kesehatan harus benar-benar diperhatikan dengan ketat. Memastikan para guru dan murid dalam kondisi sehat," ujarnya.

Khusnul menegaskan protokol kesehatan harus dikedepankan meski nantinya tidak semua sekolah dibuka dan waktu belajar pun tidak penuh seperti biasa. "Namun tentunya tetap memperhatikan kesiapan sekolah, guru, murid serta lingkungannya," pungkasnya. (ard)

## DISAYANGKAN, GADUH PUBLIK FIGUR TERKAIT WABAH CORONA



Jakarta-Beberapa publik figur di Indonesia dinilai mengomentari kasus Covid-19 tanpa data dan bukan sumber yang merupakan pakar di bidangnya. Kondisi ini sungguh disayangkan karena bisa membuat bingung dan memancing kegaduhan di masyarakat. Padahal, di dunia keartisan mereka memiliki pengikut ribuan bahkan jutaan.

Untuk diketahui, musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji menjadi perhatian netizen setelah mengundang Hadi Pranoto, pria yang mengklaim menemukan obat herbal antibodi COVID-19. Wawancara di YouTube milik Anji itu menuai polemik karena Hadi menyebut obat itu mampu menyembuhkan pasien corona.

Terkait viralnya video itu, Jubir Satgas

COVID-19, Prof Wiku Adisasmito, mengimbau masyarakat agar jangan cepat percaya pada pemberitaan yang beredar. "Mengenai siapa Saudara Hadi Pranoto, silakan ditelusuri apakah yang bersangkutan adalah seorang profesor atau peneliti (dari institusi perguruan tinggi/riset mana) seperti yang sedang beredar saat ini," ujar Wiku, Minggu (2/8).

Wiku juga meminta agar publik figur dan tokoh masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap sumber berita atau referensi sebelum menyebarkannya kepada publik. "Untuk figur publik dan tokoh masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap sumber berita atau referensi sebelum menyebarkan kepada publik. Silakan check dan recheck pada sumber yang benar dan ahlinya," tegas Wiku.

Dalam wawancaranya dengan Anji, Hadi mengklaim telah menemukan obat herbal antibodi yang mampu menyembuhkan Covid-19 dalam hitungan 2-3 hari. "Orang kecil, dewasa, orang hamil dan seterusnya alhamdulillah sampai saat ini temen-temen bisa merasakan khasiat obat itu," katanya.

Pria itu mengaku sudah memproduksi ribuan botol obat herbal. Meski begitu, ia mengatakan ada kendala dari segi anggaran dan biaya dalam produksi obat herbal

tersebut. Untuk itu, ia meminta bantuan masyarakat yang mampu untuk membantunya. Hadi juga menambahkan, obat antibodi temuannya tak memiliki efek samping. Sebab, obat tersebut terbuat dari bahan herbal dan dikemas seaman mungkin.

Terpisah, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menegakkan klaim seorang pria bernama Hadi Pranoto yang mengaku telah menemukan 'obat COVID-19' di channel YouTube musisi Anji. IDI menegakkan klaim Hadi Pranoto itu membahayakan.

"Ya namanya pembohongan, kan penipuan masyarakat. Dan itu sangat berbahaya sekali. Kalau menyebar luas begitu gimana?" kata Wakil Ketua Umum PB IDI, dr. Slamet Budiarto, Minggu (2/8).

IDI tak menemukan jejak Hadi Pranoto sebagai dokter. "IDI udah mengecek, nggak ketemu, di database IDI juga nggak ada," katanya.

Slamet menilai pernyataan-pernyataan seperti ini membahayakan. Bahkan, dia berharap aparat penegak hukum mengusut hal ini. "Si artis Anji itu harus bisa membuka dia kerja di mana, profesornya di mana, kan

Baca hal 11

## DPR DESAK PEJABAT LINDUNGI DJOKO TJANDRA HARUS DIPIDANA

JAKARTA - Terpidana kasus cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Joe alias Joker sudah resmi menjadi warga binaan. Untuk sementara, Joker ditahan di Rutan Salemba cabang Mabes Polri. Pejabat yang selama ini diduga kuat terlibat melindungi Joko Tjandra juga harus dipidana.

Seperti diketahui, Joko Tjandra, yang buron sejak awal 2009 itu diringkus saat bersembunyi di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Kamis (30/7) malam. Selama ini, Joko Tjandra diketahui bebas keluar masuk Indonesia. Diduga kuat, Joker mendapatkan fasilitas dari oknum aparat penegak hukum yang berkonspirasi dengannya.

Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana meminta Bareskrim Polri mengusut tuntas oknum yang membantu Djoko Tjandra di Imigrasi. "Harus ada pengusutan di Imigrasi, kemungkinan adanya oknum yang membantu membuat paspor di Imigrasi Jakarta Utara, juga kemungkinan adanya oknum yang membantu menghapus Djoko Tjandra dari daftar cekal, dan bisa jadi oknum yang membantu Djoko Tjandra melalui jalur darat di perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Malaysia," kata dia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (2/8). Politikus Partai NasDem tersebut menduga Djoko Tjandra bisa bebas keluar masuk Indonesia dengan menggunakan jalur darat melalui Entikong, Kalimantan Barat.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR

RI, Herman Hery meminta agar Jaksa Pinangki tidak hanya diberhentikan dari jabatannya. Dia mendesak agar jaksa perempuan itu diproses pidana. "Jaksa Agung seharusnya mengikuti yang dilakukan Kapolri. Yakni menerapkan pidana kepada pelaku kejahatan tanpa terkecuali. Upaya ini sebagai efek jera," jelas Herman.

Menanggapi hal ini, Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Hari Setiyono menyatakan semuanya masih berproses. Dari hasil pemeriksaan, Pinangki dijatuhi hukuman disiplin dan pencopotan jabatan. "Yang bersangkutan masih punya hak menyatakan menerima atau keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin tersebut dalam waktu 7 hari," ucap Hari.

Jika Pinangki keberatan, maka proses masih akan terus berlanjut. Sebaliknya apabila menerima, Pinangki dinyatakan resmi tidak menjabat lagi di Kejaksaan Agung. "Ada proses yang harus dilalui. Soal pidana, nanti akan dilihat lebih lanjut. Kita ikuti dulu perkembangannya," papar Hari.

Sebelumnya, Menkopolkum Mahfud MD dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (1/8). Dia menyoroti vonis yang sepatasnya diberikan atas sepak terjang Joko Tjandra. "Joko Tjandra tidak hanya harus menghuni penjara dua tahun. Karena tingkahnya, dia bisa diberi hukuman-hukuman baru yang jauh lebih lama," cuit Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi



Djoko Tjandra Buronan 11 tahun kasus Bank Bali berhasil ditangkap Polri

(MK) itu menyebut selain korupsi, ada tindak pidana lain yang dilakukan Joko Tjandra. Antara lain penggunaan surat palsu dan penyuaipan kepada pejabat yang melindunginya. "Pejabat-pejabat yang melindunginya harus siap dipidanakan. Kita harus kawal ini," terangnya.

Dia menambahkan kasus Joko Tjandra sejak 2009 lalu dikelilingi mafia hukum. Terbukti, Joko Tjandra bisa mengetahui vonis hukuman penjara bagi dirinya dan melarikan diri sebelum hakim mengetuk palu. "Nah, siapa yang memberi karpet saat itu sehingga Joko Tjandra bisa kabur sebelum hakim membacakan vonisnya? Mafia ini sudah lama ada," ucap Mahfud. (ist)

## KETUA DPD NILAI TERLALU DINI BICARA KAPOLRI BARU

Surabaya-Maraknya pemberitaan seputar penangkapan buronan terpidana kasus Cessie Bank Bali Djoko S. Tjandra yang diikuti dengan bergaungnya sejumlah pendapat, mengenai kepantasan sosok Kabareskrim Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo menjadi kandidat kuat pengganti Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz, dianggap terlalu dini oleh Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Di sela reses sebagai Senator Dapil Jawa Timur di Surabaya, LaNyalla menyatakan di UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian disebut dengan jelas, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Bahkan bila dalam 20 hari, DPR belum memberikan pendapat, sesuai hukum yang berlaku, dianggap menyetujui.

"Artinya siapa suksesor Pak Idham sepenuhnya ada di tangan Presiden. Karena memang regulasinya begitu. Gak perlu kita goreng kasus penangkapan Djoko Tjandra dengan suksesi Kapolri. Saya tahu persis sikap Pak Sigit, saya yakin dia malah tidak nyaman disanjung-sanjung begitu, apalagi diidentikkan dengan suksesor kapolri," tegas LaNyalla, Minggu

(2/8).

Ditambahkan LaNyalla justru yang harus mendapat apresiasi adalah Kapolri yang dengan cepat menjalankan perintah Presiden Jokowi dengan membentuk tim. Yang kebetulan tim itu dipimpin Kabareskrim. "Jadi aplausnya untuk Kapolri dan Tim Mabes Polri. Bukan dipersonifikasi ke orang. Itu kan kerja tim. Dan ingat, masih ada terpidana dan DPO lain yang ber-keliaran entah di mana. Ini juga pe-kerjaan rumah semua instansi terkait," urainya.

Ditanya mengenai adanya pernyataan dari Senator DPD RI yang mendukung Kabareskrim untuk menjadi kandidat kapolri, LaNyalla menyatakan itu hak Senator untuk menyampaikan pendapat pribadi. Karena di DPD, 136 Senator dari 34 provinsi di Indonesia punya hak dan dijamin untuk menyampaikan pendapat. Apalagi berkaitan dengan kepentingan daerahnya. "Tetapi itu belum tentu menjadi sikap lembaga," tandasnya.

Dirinya memahami Senator Alexander asal Bangka Belitung berpendapat seperti itu. Karena memang kinerja Bareskrim di bawah kepemimpinan Sigit mengakomodasi dan menindaklanjuti laporan



Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti

seputar pertambahan Timah yang disampaikan DPD. "Tetapi itu kan bagi Senator asal Babel, kan belum tentu bagi Senator dari provinsi lain. Jadi pendapat Senator sah saja mewakili kepentingan daerahnya. Tetapi belum tentu pendapat lembaga," ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, menilai sosok Listyo Sigit layak menjadi pengganti Kapolri Idham Aziz yang akan memasuki usia pensiun. Pernyataan tersebut langsung ditanggapi politisi Partai Gerindra Fadli Zon melalui akun medsosnya, dengan kalimat, "O ingin jadi Kapolri?," tulisnya. (ist)

## TARIK ULUR PEMBUKAAN PARIWISATA SAAT PANDEMI DI KABUPATEN BLITAR

**B**litar – Meski beberapa daerah di Jawa Timur (Jatim) sudah mulai membuka destinasi wisatanya, namun Kabupaten Blitar hingga kini belum mengeluarkan keputusan resmi. Pasalnya masih terjadi tarik ulur antara pengusaha atau pengelola wisata dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Jika mengacu pada surat edaran (SE) Sekretaris Daerah tertanggal 2 Juli 2020 berisi rekomendasi untuk uji coba membuka destinasi wisata, objek wisata bisa buka pada masa New Normal dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Namun ketika masuk menjadi zona merah, karena adanya kasus positif Covid-19 harus tutup kembali. Kebijakan ini dianggap kurang tepat, jika dikaitkan dengan semangat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat terutama bidang pariwisata.

Seperti disampaikan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (Bapparda) Kabupaten Blitar, Akhsin Al Fata. "Ada komitmen jika terdapat kasus positif Covid-19 di wilayah setempat, serta masuk zona merah maka harus ditutup dan uji coba berakhir akhir Juli 2020 ini," tutur Akhsin, Minggu (2/8). Untuk diketahui, sesuai rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blitar, destinasi wisata memasuki masa uji coba era masa New Normal sejak 2-31 Juli.

Maka seharusnya, pasca uji coba harus segera dikeluarkan kembali surat atau aturan sebagai dasar untuk membuka tempat wisata yang sebelumnya sudah memenuhi syarat untuk buka di masa New Normal. Sektor pariwisata berbeda dengan jenis usaha jasa lain yang sifatnya primer, tidak bisa buka tutup secara tiba-tiba. Sebab diperlukan per-

siapan dan terapi khusus, terutama dari sisi tenaga dan biaya yang cukup besar. "Kalau ada kebijakan yang berubah-ubah, membuka dan menutup justru akan menurunkan daya bangkit sektor pariwisata," jelasnya.

Selain itu, sektor pariwisata juga melibatkan UKM, seperti produksi makanan khas atau oleh-oleh dan kerajinan lainnya. "Pariwisata juga tidak lepas dari promosi, maka disayangkan jika ada kebijakan buka tutup secara mendadak," tandas Akhsin.

Selama ini para pemilik atau pengelola wisata sudah menerapkan persyaratan protokol kesehatan mulai pengecekan suhu tubuh, pemakaaian masker, menjaga jarak dan menyediakan tempat cuci tangan. "Selama ini pihaknya (Baparda) juga ada pengecekan di lokasi destinasi wisata yang sudah buka, bahkan melalui destinasi wisata yang buka bisa dijadikan sarana edukasi kepada masyarakat terkait protokol kesehatan Covid-19," ungkapnya.

Dari pantauan Bapparda sejak 31 Juli 2020 atau bertepatan dengan masa akhir uji coba pembukaan di masa New Normal, ada 3 destinasi wisata yang buka kembali yaitu Kampung Coklat, Pantai Serang dan Negeri Dongeng.

Akhsin berharap segera diterbitkan dasar aturan baik rekomendasi atau surat edaran yang menjadi acuan pengelola wisata membuka kembali usahanya. "Karena dengan adanya pariwisata, bisa menjaga kesehatan psikologis berupa refreshing yang akhirnya meningkatkan imunitas kita," paparnya.

Ditambah Akhsin pihaknya setuju jika rekomendasi terkait penerapan protokol kesehatan, diterapkan sebagai



Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (Bapparda) Kab. Blitar, Akhsin Al Fata

punishment bagi tempat wisata yang menjadi kluster penyebaran Covid-19. "Sepakat harus ditutup untuk disterilkan, karena saat ini wisata sedang proses untuk bangkit kembali," imbuhnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Disparbudpora Kabupaten Blitar, Arinal Huda ketika dikonfirmasi mengenai hal ini membenarkan jika pariwisata memang membutuhkan kepastian. "Tanpa kepastian, dampaknya akan tidak bagus bagi dunia pariwisata itu sendiri," kata Huda.

Jika mengacu pada Surat Edaran (SE) Bupati Blitar tanggal 13 Juli 2020 No.360/469/409.208.1/2020 point 7 dijelaskan bagi destinasi yang berada di zona merah, diminta untuk menutup wisatanya. Namun informasinya pemkab akan memberikan kelonggaran kepada destinasi wisata untuk bisa buka meskipun zona kecamatannya merah. "Hal ini kami pahami bahwa pariwisata memang membutuhkan kepastian, rencananya Senin (3/8) akan ada evaluasi atas uji coba pembukaan wisata selama Juli 2020 ini, dan nanti akan dibuat kebijakan baru terkait pembukaan wisata," pungkasnya. (ais)

## SISI SELATAN SELESAI, MADIUN LANJUT BANGUN JL. PAHLAWAN BAGIAN UTARA

**M**ADIUN — Pahlawan Street Center yang sering disebut sebagai Malioboro-nya Kota Madiun telah selesai penataannya. Sekarang Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun akan melanjutkan pembangunan ke Jalan Pahlawan sisi utara. Titik awal pembangunan antara perempatan patung pecel sampai ke Polres Madiun Kota.

Seputaran Jalan Pahlawan yang sebelumnya biasa saja, kini disulap menjadi pedestrian yang nyaman. Hal tersebut sejalan dengan program yang dicanangkan Madi-Inda (Mada) sebelum menjabat.

Walikota Madiun, Maldi, menyampaikan pembangunan pedestrian di Jalan Pahlawan sisi utara berlanjut setelah diselesaikannya penataan sisi selatan

Jalan Pahlawan. Trotoar utara tersebut akan dibuat sama dengan sisi selatan, yakni lebar trotoar 5 meter dan panjang kurang lebih 500 meter. "Untuk pembangunannya akan dimulai pekan depan," kata Maldi, dikutip Minggu (2/8).

Maldi menginginkan pedestrian tersebut dapat menjadi zona nyaman untuk pejalan kaki. Dirinya mencontohkan, apabila ada yang tiba di Stasiun Daop 7 Madiun dapat langsung berjalan kaki menikmati Jalan Pahlawan.

Maldi berharap dengan penataan kawasan tersebut, selain membuat nyaman tetapi dari segi estetika juga menambah minat masyarakat baik dari dalam maupun luar Kota Madiun. "Ke depannya, kawasan Jalan Pahlawan ini akan menjadi destinasi wisata andalan.



Wajah trotoar di sepanjang Jl. Pahlawan Kota Madiun sisi selatan yang telah tertata rapi

Ada enam titik kunjungan di sepanjang jalan tersebut.

Di depan Bakorwil nanti jadi klaster bonsai. Utaranya lagi ada klaster kuliner luar kota seperti satai Madura, masakan Padang, soto Lamongan, dan lainnya," jelas Maldi. (Ger)



## SALING KLAIM KARTIKA-KAJI SHOLAH DI PILBUP LAMONGAN

Dua kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Nahdlatul Ulama (NU), Sholahuddin alias Kaji Sholah dan Kartika Hidayati, saling klaim soal rekomendasi PKB (10 kursi) di Pilbup Lamongan 2020. Lantas, kepada siapa rekomendasi akan diterbitkan?

**Fauzan Fu'adi,**  
**Wakil Sekretaris DPW PKB Jatim**

"Ya kita tunggu prosesnya nanti siapa yang direkom. Yang pasti, standar kita untuk penentuan calon bupati/kepala daerah semuanya sama. Itu kan pasti semua kita jadikan bahan pertimbangan. Tapi intinya, dua orang ini kader terbaik kita. "Nanti kita panggil satu per satu. Sebelumnya dua orang ini kan kita kasih kesempatan duduk bareng, mungkin belum ada kesepakatan ya sudah nanti akan kita mediasi oleh DPW."



**Kartika Hidayati,**  
**Ketua PC Muslimat NU Lamongan**

"Kita nanti koalisinya PKB-PDIP. Nanti ada partai-partai lain, tunggu aja. Tapi yang jelas, koalisi nasional kita sudah bertemu PKB-PDIP. Kan saya bilang, semua tidak menutup kemungkinan. Yang penting di dalam musyawarah mufakat memutuskan, bahwa PKB-PDIP memberangkatkan si fulan untuk mewakili Kartika, selesai!"



**Kaji Sholah (Sholahuddin),**  
**Aspri Wapres, KH Ma'ruf Amin**

"Kalau saya sih yakin ke kita, karena kita melihat sejauh mana kedekatan PKB dengan kiai. Dan yang pasti, para masyarakat di Lamongan ini kan sampai hari ini benar-benar berdoa, berikhtiar agar PKB tetap bergandengan dengan NU untuk memberangkatkan kita. Dipasangkan dengan siapa pun, saya siap. Lho kan masalah mau kawin itu, masalah calon istri itu, yang penting dipilihkan orang tua."



PETA KURSI POLITIK DI PILKADA LAMONGAN	PKB		Gerindra	
	Demokrat	10 Kursi	PPP	4 kursi
PDIP	9 Kursi	Hanura	3 kursi	
PAN	8 Kursi	Nasdem	1 Kursi	
Golkar	7 kursi	Perindo	1 kursi	
	6 kursi			

## SIMAK! KPU BAKAL UBAH ATURAN TERKAIT KAMPANYE SAAT PANDEMI

JAKARTA - Banyaknya masukan terkait Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, membuat KPU berencana melakukan perubahan.

"Saat ini KPU telah mempersiapkan rancangan perubahan PKPU No 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pilkada. Rancangan perubahan telah diajukan ke DPR untuk dikonsultasikan," kata Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Minggu (2/8).

Raka menyampaikan, usulan yang diterima KPU terkait perubahan PKPU ini diberikan sejumlah pihak, salah satunya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memastikan, masukan-masukan tersebut akan dibahas lebih lanjut baik dalam rapat KPU maupun dalam proses konsultasi dan harmonisasi di DPR.

Adapun, kata dia, sejumlah masukan terkait kampanye Pilkada 2020 di

antaranya penggunaan masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye, juga terkait pengaturan kampanye di media daring, pengaturan kampanye secara langsung (offline) perlu lebih diantisipasi agar tetap sehat, aman, dan demokratis.

Sampai usulan yang diajukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tentang tema debat pasangan calon. Visi misi dan program pasangan calon dalam mengatasi pandemi COVID-19 agar diangkat sebagai salah satu tema. "Sekali lagi berbagai masukan dari berbagai pihak nanti akan dicermati dalam proses perubahan PKPU Kampanye Pilkada," katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian memberikan masukan ke KPU terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Salah satunya tentang pentingnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Tito menyampaikan bahwa dirinya telah mendorong KPU untuk membuat



Pilkada di tengah pandemi mendorong paslon kepala daerah kreatif memanfaatkan media sosial

satu regulasi yang mengatur agar protokol kesehatan ini benar-benar diimplementasikan di tengah masyarakat. Misalnya, menjadikan masker dan hand sanitizer sebagai alat peraga kampanye bagi kontestan di Pilkada serentak 2020.

"Dimasukkan ke dalam aturan PKPU misalnya alat peraga masker, maskernya boleh menggunakan gambar, nama kontestan misalnya seperti itu hand sanitizer juga," kata Tito dalam jumpa pers usai audiensi di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Kamis (30/7). (ist)

A portrait of a woman with dark hair, smiling and looking slightly to the right. She is wearing a black and white patterned jacket over a black top. The background is blurred, showing what appears to be an indoor setting with wooden chairs.

*Densi Kanti*  
**MENEMUKAN SENSASI  
SAAT BERMAIN LAYANG-LAYANG**

Foto : Kompas / Heru Sri Kumoro

**D**ari situasi dan kondisi apa pun, termasuk dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, temukanlah sensasi bermain. Pemain musik tradisional Sunda, Dewi Kanti (45), memiliki resep itu.

“Karena pandemi Covid-19 ini masih takut keluar rumah, saya bermain-main dengan musik gamelan yang ada di paseban,” kata Dewi Kanti, yang tinggal di Paseban Tri Panca Tunggal di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat.

Paseban itu tempat tinggal sesepuh penghayat Sunda Wiwitan, Pangeran Jatikusuma. Dewi Kanti merupakan salah satu putri Pangeran Jatikusuma.

“Ketika memasuki peralihan ke musim kemarau seperti sekarang ini, di luar rumah banyak yang bermain layang-layang. Teringat masa kecil dulu, saya itu tombi sekali dan suka bermain layang-layang,” ujar Dewi Kanti seperti dikutip dari Koran Kompas (2/8/2020).

Ketika ingin menerbangkan layang-layang, sampai-sampai Dewi Kanti naik ke lantai dua paseban.

Dewi merasakan sensasi ketika terus mengulur benang dan layang-layang agar terus membubung tinggi, naik ke angkasa.

“Di situlah sensasi bermain layang-layang saya temukan. Untuk kejadian itu terkesan sampai sekarang,” ujar Dewi Kanti.

Belakangan Dewi Kanti menerima banyak tamu akibat bangunan bakal makam untuk ayahandanya ditolak sebagian warga dan disegel satuan pamongpraja setempat.

“Penolakan itu akibat cara pandang yang berbeda. Tetapi persoalannya lebih jauh dari itu, karena kita mulai kehilangan akar tradisi dan jati kita,” tambah Dewi.

Mempertahankan akar tradisi dan jati diri ini mungkin saja seperti sensasi yang ditemukan Dewi Kanti saat bermain.

Namun, ia membutuhkan ketahanan batin yang luar biasa untuk menghadapi konflik social yang lebih luas dan terbuka.

“Semoga kami terus kuat untuk bertahan,” tegas Dewi Kanti.

Terlahir dan dibesarkan dalam komunitas adat Sunda Wiwitan, Cigugur, Kabupaten Kuningan, nama Dewi Kanti menyita perhatian khalayak tatkala dinyatakan lolos sebagai salah satu komisioner Komnas Perempuan periode 2020-2024.

Berbekal rekam jejak kegigihannya memperjuangkan hak-hak perempuan adat, menjadi modal sosial Kanti terpilih menjadi komisioner di tubuh lembaga independen negara itu.

Rekam jejak perjuangan membela masyarakat adat Sunda Wiwitan dengan segala dinamika yang pernah dialaminya, meyakinkan Kanti bahwa kondisi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja. Terutama dalam urusan pemenuhan hak komunitas adat dalam aspek pembangunan.

Dia menyadari, selama ini negara salah langkah mengelola komunitas adat di tanah air. Masalah itu disebutkan mulai dari tidak ada pengakuan terhadap komunitas penghayat agama leluhur, hingga tidak dilibatkannya komunitas adat dalam menentukan kebijakan.

Kanti berkomitmen, keberadaannya di Komnas Perempuan akan mewarnai cara pandang kebijakan negara yang belum memberikan perlindungan bagi komunitas perempuan adat.

Kekosongan peran negara hadir di tengah masyarakat adat, menjadi pintu masuk Kanti untuk mendesak negara untuk segera memberikan hak konstitusi yang belum dipenuhi (Ist).



Foto: @senivpetro

## PEMULIHAN EKONOMI PASCAPANDEMI BUTUH KONTRIBUSI PEREMPUAN

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Nadia Fairuza menyatakan, kontribusi perempuan diperlukan dalam upaya memulihkan perekonomian nasional setelah masa pandemi berlalu. "Perempuan menjadi pihak yang terdampak secara tidak proporsional karena mereka tersebar di banyak kelompok rentan dan kelompok terdampak pandemi, baik sebagai seorang tenaga kerja maupun sebagai seorang perempuan yang penghasilannya bergantung pada kepala keluarga," kata Nadia Fairuza dalam siaran pers di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kontribusi perempuan dalam upaya memulihkan perekonomian bisa dicapai dengan memberikan akses kepada perempuan untuk bekerja di semua bidang tanpa adanya pembatasan.

Ia mengungkapkan, perempuan sebenarnya terwakili dalam jumlah besar di UMKM dan sektor informal.

"Lebih dari 50 persen UMKM di Indonesia dimiliki oleh perempuan. Namun di masa pandemi seperti sekarang ini, keterwakilan dalam jumlah besar seperti ini juga menjadikan mereka lebih rentan terkena dampak pandemi," katanya

Data Bank Dunia menunjukkan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia, yaitu sebesar 53,5 persen. Jumlah ini masih jauh kalau dibandingkan dengan partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 81,82 persen.

Selain itu, partisipasi angkatan kerja perempuan Indonesia juga lebih rendah dari rata-rata partisipasi angkatan kerja perempuan di Asia Timur dan Pasifik yang sebesar 67,7 persen.

Nadia menambahkan, angka partisipasi ini paling rendah untuk perempuan yang sudah menikah dan perempuan yang memiliki anak usia dini. Salah satu alasan di balik rendahnya angka partisipasi adalah banyak perempuan meninggalkan pekerjaan mereka untuk mengurus keluarga, terutama setelah mereka melahirkan.

"Dibutuhkan adanya sinergi antar institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam membantu meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan. Sinergi ini dapat diwujudkan dalam sebuah kesepakatan atau peraturan yang memungkinkan semua institusi menyediakan fasilitas ramah gender yang mendukung para karyawan perempuan dalam men-

jalankan pekerjaannya," katanya.

Ia berpendapat bahwa rendahnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja juga diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sejumlah tenaga kerja perempuan kehilangan pekerjaan.

Salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja, lanjutnya, adalah dengan memfasilitasi mereka untuk mengakses layanan penitipan anak. Ini dinilai akan membantu perempuan untuk kembali ke pasar kerja dan berkontribusi pada ekonomi (Ant).

"Perempuan menjadi pihak yang terdampak secara tidak proporsional karena mereka tersebar di banyak kelompok rentan dan kelompok terdampak pandemi, baik sebagai seorang tenaga kerja maupun sebagai seorang perempuan yang penghasilannya bergantung pada kepala keluarga,"

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, Nadia Fairuza





# PERUSAHAAN TEKNOLOGI BESAR RAUP UNTUNG DI TENGAH RESESI

**D**i tengah resesi yang menimpa Negeri Paman Sam beberapa perusahaan teknologi skala besar seperti Amazon, Facebook, Apple, dan Google mengukuhkan posisi mereka dengan mencetak laba fantastis.

Facebook Group (FB) menyebut pada Kamis (30/7) bahwa pihaknya memiliki lebih dari 3 miliar pengguna aktif bulanan pada kuartal yang berakhir pada Juni lalu. Laba tersebut termasuk penggunaan Instagram dan Whatsapp.

Melansir CNN, perusahaan mengatakan bahwa pertumbuhan pengguna mencerminkan kenaikan komunikasi seiring dengan pembatasan yang terjadi di seluruh dunia.

Sementara itu, Amazon mengungkapkan pendapatan kuartal ini naik sebesar 40 persen dari tahun sebelumnya atau

menembus 88,9 miliar dolar AS, setara Rp1.244 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS). Angka ini melampaui 8 miliar dolar dari proyeksi para analis.

Kenaikan pendapatan ini disebabkan oleh melonjaknya permintaan lewat pembelian daring di seluruh dunia.

Serupa, Apple yang mengalami penurunan pendapatan pada beberapa tahun terakhir melaporkan mencetak kenaikan penjualan pada kuartal sama sebesar 11 persen. Kenaikan penjualan terjadi merata di berbagai produk perangkat keras dan layanan digital.

CEO Apple Tim Cook mengklaim bahwa kenaikan tersebut merupakan bukti akan pentingnya produk Apple di kehidupan pelanggan di masa yang tidak pasti.

Perusahaan induk Google, Alphabet, merupakan satu-satunya pengecualian,



mencatatkan penurunan pendapatan pertama secara tahunan.

Kemunduran ini disebabkan oleh terlukanya bisnis periklanan perusahaan. Pun begitu, saham GOOGLE masih mencetak pertumbuhan sebesar 1 persen pada perdagangan setelah jam kerja.

Pertumbuhan pendapatan perusahaan-perusahaan teknologi menonjol di saat usaha lainnya di seluruh AS terseok-seok.

Diketahui, ekonomi AS pada kuartal II 2020 mengalami kontraksi sebesar 32,9 persen, mengantarkan Negeri Paman Sam ke jurang resesi. Pada kuartal I 2020 pertumbuhan tercatat minus 5 persen.

Kondisi ini menempatkan AS ke ekonomi terburuk sejak 1947. Penurunan ekonomi disumbang oleh konsumsi rumah tangga yang turun 34,6 persen secara tahunan. Padahal, indikator ini merupakan penyumbang utama ekonomi AS selama ini (ist).



# Yuk Rawat Kuku

## AGAR TAK MUDAH PATAH



Foto: Freepik.com

Punya kuku yang mudah patah memang menyebalkan. Pasalnya, selain terlihat tidak estetik, terkadang kuku yang patah meninggalkan rasa sakit bahkan luka. Agar tak terjadi hal demikian, perawatan kuku juga wajib dilakukan. Simak yuk caranya!

### Pakai bawang putih

Potong bawang putih menjadi dua bagian dan gosok sisi yang berair pada kuku kamu. Lakukan treatment ini selama satu menit setiap hari dan lihat hasilnya dalam 15 hari.

### Pakai bawang putih cincang

Jika Kamu tidak suka cara pertama, coba cara berikut ini. Cincang halus bawang putih dan masukkan ke dalam botol nail polish. Biarkan mereka tercampur sekira satu minggu. Setelah seminggu, Kamu dapat menggunakannya dengan cara mengoleskannya seperti ketika kamu ingin mewarnai kuku.

### Beri nutrisi pada kuku

Melembabkan dan memberi nutrisi pada kuku Kamu sangat penting untuk kesehatan kuku. Cobalah ramuan minyak kecantikan untuk merawat kuku dan kutikula kamu. Tambahkan satu sendok teh minyak argan, kapsul vitamin E, lima tetes minyak esensial kemenyan dan 20 tetes minyak esensial jeruk ke dalam botol cat kuku yang kosong dan bersih. Kocok dan gunakan secara teratur. (Ist)



### Ramuan Lemon untuk Kuku Cantik

Jus lemon yang dicampur dengan gula dapat menghilangkan kekasaran dari tangan dan kuku kamu. Minyak kelapa membantu meningkatkan kelembapan pada kuku dan dengan penggunaan teratur dapat membantu menghidupkan kembali kuku yang mengelupas dan rapuh.

#### BAHAN-BAHAN



■ 1 lemon diiris menjadi setengah



■ 2 sendok makan gula pasir



■ Baskom berisi air hangat



■ Minyak kelapa, sesuai kebutuhan

#### LANGKAH-LANGKAH

- Campur semua bahan
- Kemudian rendam kuku selama 5-10 menit

## Ntaps! MA (dari hal 1)

Mahkamah Agung mengeluarkan aturan terbaru terkait pemidanaan pelaku korupsi. Dalam aturan tersebut, pelaku korupsi dengan minimal Rp100 miliar akan dihukum minimal penjara seumur hidup. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam aturan yang ditetapkan oleh Ketua MA Muhammad Syarifuddin pada tanggal 8 Juli 2020 tersebut, MA memiliki pertimbangan mengapa perlu menerbitkan Perma No.1 Tahun 2020 itu. "Untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan," tulis MA dalam salinan Perma No.1 Tahun 2020 yang diperoleh Harian Lentera Today, Minggu (2/7).

MA membagi kategori koruptor menjadi lima yaitu paling berat, berat, sedang, ringan dan paling ringan. Bila koruptor paling berat dihukum hingga penjara seumur hidup/mati, bagaimana dengan koruptor 'kecil' di bawah Rp50 juta?

Kategori itu tertuang dalam Peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020. Dalam Perma itu diatur kategori sangat ringan bila kerugian di bawah Rp200 juta. Tapi ada klausul khusus bila korupsinya di bawah Rp50 juta tidak dijatuhi denda, cukup pidana badan saja dan mengembalikan uang yang dikorupsi.

"Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50 juta," demikian bunyi Pasal 16 Perma Nomor 1 Tahun 2020.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P Roeslani mengungkapkan hal itu memberi efek positif bagi iklim usaha. "Kalau menurut saya sih bagus ya, kan ini iklim usaha juga akan menjadi lebih baik karena dengan ini kan diharapkan korupsi ini bisa (berkurang), kita kan inginnya nggak ada lah, maksudnya makin lama makin menurun (kasus korupsi)," katanya.

Menurut dia praktik korupsi membuat daya saing Indonesia menjadi lebih lemah. Sebab kejahatan tersebut membuat biaya yang digelontorkan oleh dunia usaha menjadi lebih tinggi dalam menjalankan usahanya. "Kan korupsi itu kan membuat daya saing (menurun) dan cost di Indonesia menjadi lebih tinggi," sebutnya.

Untuk itu sebagai pelaku usaha, pihaknya berharap adanya aturan tersebut membuat korupsi bisa ditekan. Dengan demikian daya saing Indonesia akan meningkat. "Iya itu (korupsi) kan yang mempengaruhi ke efisiensi cost kita juga, pada akhirnya ke daya saing kita juga kan pengaruhnya. Kalau menurut saya sih mendukung lah aturan yang ditetapkan oleh MA ini," tambah Rosan.

Permaterkait pemidanaan koruptor seumur hidup juga disambut baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bahkan mengaku sudah lama mendorong MA untuk menerbitkan pedoman tersebut.

"Sejak 2014 saya teriak ini, tapi nggak apalah terlambat masih lebih baik ketimbang nggak pernah ada," ujar Nawawi.

Saat ini, lanjut Nawawi, KPK tengah menuntaskan pedoman tuntutan tersebut. Hal itu lantaran KPK selama ini masih disparitas dalam memberikan tuntutan untuk para koruptor. "Selama ini disparitas tidak hanya terjadi pada putusan para hakim melainkan juga berlangsung di tingkat penuntutan oleh para penuntut umum," ucap Nawawi. "Insya Allah dalam waktu dekat kami berusaha merampungkan pedoman penuntutan," tutupnya.

Pada April lalu ICW mengeluarkan data bila terdakwa korupsi divonis bebas dan lepas pada 2019 meningkat dibanding periode sebelumnya. Pada 2017 ada 35 orang terdakwa yang divonis bebas atau lepas, pada 2018 ada 27 orang terdakwa sementara pada 2019 ada 54 orang terdakwa.

Pada putusan bebas (*vrijspraak*) artinya tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian yaitu 2 alat bukti yang sah dan tidak dapat meyakinkan hakim.

Sedangkan putusan lepas (*onslag van recht vervolging*) artinya segala tuntutan hukum atas perbuatan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum tapi terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, misalnya masuk ke pelanggaran hukum perdata, hukum adat atau hukum dagang.

Sepanjang 2019, ICW mencatat ada 842 orang terdakwa divonis ringan (82,2 persen), diputus sedang 173 orang (16,9 persen), diputus beras 9 orang (0,9 persen) dan diputus bebas/lepas sebanyak 54 orang (5,2 persen) yang berasal dari 1.019 perkara korupsi. Besaran ringan adalah bila dituntut penjara dari 0-4 tahun, sedang 4-10 tahun dan berat di atas 10 tahun.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi pengadilan yang paling banyak menjatuhkan vonis bebas atau lepas yaitu terhadap 17 orang terdakwa disusul pengadilan negeri Aceh sebanyak 10 orang terdakwa, Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Manado masing-masing 5 terdakwa dan pengadilan-pengadilan lainnya.

Dari antara vonis bebas dan lepas itu, ICW mencatat dua putusan kontroversial yaitu putusan lepas mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas obligor Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) di tingkat kasasi dan putusan bebas

mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir dalam perkara dugaan korupsi proyek PLTU Riau-1. Padahal, di kedua perkara ini melibatkan aktor-aktor politik dan kerugian negara yang besar. Dalam perkara Syafruddin, kerugian negara sangat besar mencapai Rp4,58 triliun.

Selain peningkatan vonis bebas/lepas, menurut Kurnia, masih terjadi disparitas hukuman. Dalam catatan ICW perkara-perkara dengan kerugian negara besar masih kerap divonis ringan oleh majelis Hakim. Hal ini berbeda dengan perkara lain yang memiliki kerugian negara kecil namun justru dihukum berat. Tak hanya itu, perkara suap pun menjadi sorotan, dengan karakteristik latar belakang profesi serupa akan tetapi vonis diantara keduanya berbeda jauh.

Misalnya dua terdakwa sama-sama kepala desa, yang satu merugikan negara sebanyak Rp542,168 juta sedangkan yang satu lagi Rp42 juta tapi yang merugikan negara Rp542 juta divonis 2,5 tahun penjara sedangkan yang merugikan negara Rp42 juta divonis 4 tahun penjara, ini terjadi di pengadilan negeri Makassar dan pengadilan negeri Banjarmasin.

Kasus lain adalah sama-sama direktur suatu perusahaan dengan satu orang merugikan keuangan negara sebesar Rp1,745 miliar dan satu lagi Rp500 juta, terdakwa yang merugikan Rp1,745 miliar divonis 1 tahun 4 bulan penjara sedangkan yang merugikan keuangan negara Rp500 juta malah kena 4 tahun 5 bulan penjara.

Begitu pula dalam kasus suap terhadap sekretaris desa, ada yang menerima suap Rp245 juta divonis 1 tahun dan seorang kepala seksi evaluasi dan pelaporan yang menerima Rp30 juta juga divonis 1 tahun penjara. (ist,ins)

---

## Disayangkan, (dari hal 2)

nggak jelas," ujarnya. "Dicari (jejaknya) nggak ada dan penegak hukum harus turun tangan," sambung Slamet.

Slamet menuturkan suatu obat harus diuji klinik terlebih dahulu sebelum bisa diklaim menyembuhkan. Sementara itu, ramuan herbal juga tidak bisa diklaim sebagai obat karena dia hanya suplemen.

Sementara itu, pemerintah melaporkan penambahan 1.519 kasus baru Corona (Covid-19) di Indonesia. Total tercatat ada lebih dari 111 ribu kasus. Berdasarkan data di situs Satgas Penanganan Covid-19 pada Minggu (2/8), total kasus Corona di Indonesia 111.455. Data ini dihimpun dengan cut off pukul 12.00 WIB.

Pada hari ini pemerintah juga sedang memantau kasus suspek sebanyak 62.366. Dan ada 20.032 orang yang sedang dalam perawatan. Dilaporkan juga pada hari ini total ada 68.975 pasien yang telah dinyatakan sembuh dari COVID-19. Sementara itu, pasien meninggal akibat Corona dilaporkan ada 5.236. (ist)

# BALI MASUK DAFTAR DESTINASI TERBAIK DUNIA 2020

Sebanyak 25 destinasi di dunia masuk dalam penghargaan Destinasi Populer atau Terbaik di Dunia Tahun 2020 versi Trip Advisor, situs untuk merancang dan memesan perjalanan berbasis di Amerika Serikat (AS). Pulau Bali, Indonesia masuk urutan ke-4.

Destinasi yang terpilih dinilai memiliki keunikan dan pilihan tempat wisata menarik yang ditawarkan kepada pelancong. Saat berkunjung ke sana, wisatawan bisa menikmati sinar

matahari sembari berjalan-jalan di atas pasir putih, atau berkunjung ke hutan yang masih asri untuk melihat monyet liar. Wisatawan juga bisa berkunjung ke Ubud jika ingin menikmati pertunjukan tari tradisional, mengikuti kelas pembuatan batik, atau mengikuti kelas yoga. Beberapa tempat wisata yang bisa dikunjungi saat di Bali adalah Pantai Kelingking, Air Terjun Sekumpul, dan Pura Luhur Batukaru.

“Diharapkan setelah dibuka 31 Juli kemarin, penerapan protokol kesehatan dapat tetap dijalankan dengan disiplin. Jangan sampai setelah dibuka timbul gelombang kedua Covid-19. Hal itu yang harus dihindarkan lantaran pariwisata itu adalah bisnis kepercayaan.”



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF (MENPAREKRAF) WISNUTAMA KUSUBANDJO

## BERIKUT DAFTAR 25 DESTINASI POPULER DI DUNIA 2020 VERSI TRIP ADVISOR

 <b>1</b> London, Inggris	 <b>2</b> Paris, Perancis	 <b>3</b> Kreta, Yunani	 <b>4</b> Bali, Indonesia	 <b>5</b> Roma, Italia
---	---	--	---	--

- |                             |                        |                         |
|-----------------------------|------------------------|-------------------------|
| 6. Phuket, Thailand.        | 13. Republik Dominika. | 20. Siem Reap, Kamboja. |
| 7. Sisilia, Italia.         | 14. Bangkok, Thailand. | 21. Marrakesh, Maroko.  |
| 8. Mallorca, Spanyol.       | 15. Hanoi, Vietnam.    | 22. Lisbon, Portugal.   |
| 9. Barcelona, Spanyol.      | 16. Praha, Ceko.       | 23. Tokyo, Jepang.      |
| 10. Istanbul, Turki.        | 17. Hoi An, Vietnam.   | 24. Kyoto, Jepang.      |
| 11. Goa, India.             | 18. Rodos, Yunani.     | 25. New York, AS.       |
| 12. Dubai, Uni Emirat Arab. | 19. Kuba.              |                         |

## MEMOLES WAJAH PARIWISATA ERA NORMAL BARU

Sektor pariwisata termasuk yang paling terpuruk akibat pandemic Covid-19. Pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk membangkitkan pariwisata di masa normal baru

Keterangan :

- \*) Diperkirakan berlaku mulai September 2020
- \*\*) Diskon 30% untuk 25% kursi penerbangan bagi wisatawan domestic
- \*\*\* ) Cleanliness, Health, & Safetyness
- \*\*\*\* ) Jan-Apr 2020 terhadap Jan-Apr 2019

### DUKUNGAN PEMERINTAH

**Stimulus pemerintah pusat**

- Kompensasi pajak hotel/restoran\* **Rp. 33 Triliun**
- Insentif tiket ke 10 destinasi wisata\*\* **Rp. 400 Miliar**
- Hibah pariwisata **Rp. 100 Miliar**

**Program Pemulihan**

- **Sertifikasi CHS\*\*\*** untuk membangun kepercayaan pasar
- **Promosi** melalui media digital, elektronik, cetak
- **Revitalisasi** destinasi wisata

### PARIWISATA TERPURUK

<b>Jumlah Turis Asing</b> 5 juta kunjungan (Jan-Apr 2019) <b>45%</b> 2,8 juta kunjungan (Jan-Apr 2020)	<b>Jumlah Penerbangan</b> -27,8% domestic -42,8% Internasional	<b>Tingkat Hunian Kamar Hotel</b> 53,9% (April 2019) 12,7% (April 2020)
---	--	---

Sumber BPS. Kementerian Keuangan